

Pola Sektoral dalam Pembangunan

Oleh Faturochman*

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara disebutkan bahwa pembangunan bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Dilihat lebih jauh tujuan-tujuan pembangunan yang dicanangkan banyak mengkaji masalah peningkatan di berbagai sektor. Apabila dicermati, maka tujuan sebenarnya pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Mengingat masalah kehidupan adalah masalah yang amat sangat kompleks, maka peningkatan kualitas kehidupan yang dimaksudkan itu bukanlah masalah yang mudah.

Karenanya kemudian muncullah skala-skala prioritas. Dengan adanya prioritas-prioritas itu sering memunculkan keirian pada pihak yang tidak terkena skala prioritas.

Sejak Repelita pertama hingga kini ekonomi masih menjadi prioritas utama pembangunan. Bahwa kita semua setuju dengan diprioritaskannya ekonomi sebagai titik tekan pembangunan karena memang tidak bisa dielakkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan dasar manusia memang berkisar pada masalah ekonomi. Bukan hanya pendapat para ahli ekonomi yang menyatakan demikian, tetapi ahli psikologi pun mengakuinya, Abraham Maslow misalnya.

Karena titik tekan pembangunan adalah ekonomi, maka tolak ukur keberhasilan juga banyak mendasarkan pada parameter ekonomi. Demikian halnya dengan tolak ukur kualitas hidup. Tingkat kemajuan pembangunan kemudian diukur dengan GNP. Sebagai standar kualitas hidup, GNP dinilai oleh sebagian orang kurang memadai. Inkeles dan Diamond (1980) serta Mukherjee (1989) menggarisbawahi bahwa GNP sebagai tolak ukur kualitas hidup masih *inadequate, debatable, troublesome, static, and confining*.

Berdasarkan pada pertimbangan seperti itu, kemudian dicari indikator lain. Maka lahirlah kualitas hidup fisik (*physical quality of life*). Indikatornya antara lain tingkat kematian bayi, tahun harapan hidup, status gizi, dan sebagainya.

Lebih Tinggi

Melihat angka-angka GNP yang masih berkisar pada 540 dolar Amerika, tingkat kematian bayi yang masih tinggi, dan harapan hidup ketika lahir yang sekitar 57 tahun bagi penduduk Indonesia, berarti kualitas hidup disini masih tergolong kurang menguntungkan. Terlebih lagi kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk yang besar mestinya menjadi modal pembangunan. Karena kualitas penduduknya masih demikian, maka penduduk yang besar jumlahnya itu akan susah untuk dijadikan modal dasar pembangunan. Barangkali justru menjadi beban pembangunan.

Indikator-indikator lain yang berkaitan dengan ekonomi dan fisik memang masih banyak. Dalam bidang ketenagakerjaan, misalnya, kita masih sulit menyediakan secara cukup lapangan kerja. Padahal indikator tingginya kualitas hidup dilihat dari lapangan kerja bukan saja terpenuhinya kebutuhan pekerjaan penduduknya, tetapi juga tersedianya pilihan pekerjaan.

Memang, data dasar yang menggambarkan kualitas hidup kita bisa menyebabkan ketidakpuasan. Namun diharapkan tidak menimbulkan apatisme terhadap hasil pembangunan. Sebab, data yang ada justru sangat bermanfaat bagi semua orang untuk melangkah lebih lanjut. Dengan kata lain masih cukup

berat beban yang dipikul untuk membangun, maka diperlukan usaha yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan kualitas secara lebih cepat. Kalau tidak, beban di masa yang akan datang akan semakin berat lagi. Sebab kita tidak hanya berpacu dengan diri kita sendiri, tetapi juga berpacu dengan negara-negara lain.

Sektoral

Tampaknya yang cukup menonjol dari pola pembangunan kita adalah pola sektoral. Sedangkan secara teoritis maupun faktual tidak mungkin meningkatkan kualitas hidup secara sektoral. Benarkah demikian?

Tertarik dengan berbagai sinyalemen yang mengaitkan kurang bisa diandalkan pembangunan sektoral. Departemen Kesehatan melalui Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat mencoba mengkaji sumbangan masing-masing sektor pembangunan terhadap kualitas hidup, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Diharapkan dalam beberapa bulan ini hasil penelitian tersebut bisa segera diketahui.

Masalah lain yang sering muncul dalam usaha meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan adalah persepsi yang berbeda antara pengambil kebijaksanaan dengan masyarakat sebagai sasaran. Mulai dari sektor-sektor pembangunan, kemudian prioritas di dalam sektor itu sendiri, sampai pada realisasi pembangunan yang diwujudkan dalam proyek-proyek sering terjadi ketidakcocokan persepsi. Apa yang dianggap perlu untuk segera dilaksanakan menurut kalangan elit, dalam hal ini pemegang kekuasaan dan pemilik modal, sering dianggap kurang perlu oleh masyarakat.

Bisa dipahami mengapa sering terjadi perbedaan persepsi seperti itu. Alasan politis sering menjadi sangat berarti bagi kalangan penguasa, sedangkan bagi masyarakat hal-hal seperti itu sering dianggap berlebihan. Di sisi lain, kesejahteraan yang sangat didambakan oleh rakyat bagi penguasa hanya bisa akan terwujud di dalam lingkup yang stabilitas politiknya terjamin.

Lantas yang perlu segera dilakukan adalah memperkecil perbedaan persepsi tersebut. Dengan keyakinan bahwa kesatuan dan persatuan merupakan prasyarat lancar dan suksesnya pembangunan, maka memperkecil perbedaan persepsi itu akan mempercepat pula laju pertumbuhan. Masalahnya adalah persatuan dan kesatuan yang ditonjolkan itu terlalu sering hanya menuntut satu pihak untuk berkorban, dalam hal ini rakyat. Alasannya, tokoh pembangunan itu sendiri untuk rakyat. Jawaban seperti ini sebenarnya tidak menjawab pertanyaan. Sementara itu masyarakat semakin pandai menganalisis dan menilai keadaan. Juga dalam menilai arah, proses, dan hasil pembangunan. Oleh karena itu tidak selamanya mereka bisa sebagai pihak yang mengalah. Apalagi bila janji-janji selama masa kampanye, misalnya, tidak ditepati. Keadaan bisa menjadi tidak terkendali.

Dari situ bisa dimengerti bahwa pembangunan semestinya juga menyeimbangkan laju kualitas hidup kalangan bawah dan kalangan atas. Bahasa populernya pemerataan.

Tolak Ukur Subyektif

Kata kualitas hidup menunjuk adanya suatu tingkatan atau gradasi tertentu. Dari buruk, kurang, cukup, tinggi, rendah, dan seterusnya. Atau, kualitas hidup disini lebih rendah, lebih tinggi atau sama dengan kualitas hidup disana.

Beberapa ahli seperti Schuessler dan Fisher (1985) berpendapat bahwa untuk mengetahui tinggi rendahnya kualitas hidup sebenarnya tidak cukup hanya

dengan melihat kondisi obyektif seperti GNP, tingkat kematian bayi, dan lain-lain, tetapi juga perlu dilihat kondisi subyektifnya. Dengan demikian menilai kualitas hidup tidak cukup dengan melihat hasil-hasil pembangunan yang nyata, panjang jalan, bendungan, dan seterusnya. Perlu juga dilihat sikap dan perasaan individu dan masyarakat terhadap hasil pembangunan itu. Bisa juga dilihat dari antusiasme mereka dalam proses pembangunan yang bisa dinilai partisipasinya.

Sangat disayangkan memang bila orientasi pembangunan hanya mengejar target-target tertentu dalam wujud angka bangunan fisik. Tanpa mengetahui penilaian masyarakat sebagai sasaran utama, penilaian keberhasilan pembangunan dan kualitas hidup akan menjadi bias.

Tantangan

Kasus-kasus yang banyak terlihat akhir-akhir ini membuktikan hal itu. Keberhasilan Telkom mendapatkan laba sekian banyak dan membangun sekian ribu jaringan telepon, ternyata belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Penayangan acara di televisi yang bertujuan memberi informasi kepada khalayak justru sering menimbulkan protes karena dinilai tidak menarik sama sekali, meskipun jam siaran ditambah. Berbagai proses yang terlihat di berbagai media terhadap berbagai masalah, termasuk masalah tanah, tentunya, bisa dijadikan indikasi masih rendahnya kepuasan masyarakat, yang berarti pula masih rendahnya kualitas hidup dilihat dari tolak ukur subyektif.

Tampaknya tantangan dalam pembangunan akan semakin besar. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan dengan jalan pengadaan berbagai fasilitas tetapi juga perlu mempertimbangkan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan itu.

Mengingat bahwa kebutuhan manusia tidak pernah berhenti, maka memberikan kepuasan terhadap berbagai kebutuhan itu juga akan terus berkembang. Inilah yang akan menjadi tantangan pembangunan di masa mendatang, pembangunan yang memberi kepuasan bukan pada sekelompok atau golongan saja.

Bagi yang pesimis bisa jadi tidak perlu mengharap bisa mendapat kepuasan dari pembangunan. Kondisi seperti ini sama jeleknya dengan keadaan ketika sebagian besar orang menerima begitu saja dan puas dengan hasil-hasil pembangunan yang ada, meski jelek kondisi obyektifnya. Kita tidak bisa demikian. Lebih baik berharap dan juga berpartisipasi. Barangkali kepuasan itu didapat tidak hanya terhadap hasil tetapi juga terhadap prosesnya.

**Penulis adalah pengajar di Fakultas Psikologi dan peneliti di Puslit Kependudukan UGM*